

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi”

WACANA

Chaider S. Bamualim

Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad

Mardani

Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam

Sirojuddin Aly

Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam

Haniah Hanafie

Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik

Ahmad Abrori

Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang

TULISAN LEPAS

Rosmaria Syafariyah Widjajanti

Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VIII, No. 1, 2006

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamal F

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarif

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi

Articles

- 1-18 **Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**
Chaider S. Bamualim
- 19-30 **Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**
Mardani
- 31-50 **Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**
Sirojuddin Aly
- 51-64 **Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**
Haniah Hanafie
- 65-78 **Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**
Ahmad Abrori

Document

- 79-90 **Gerakan Anti Korupsi dan Restrukturisasi Gaji Pegawai Negeri**
Achmad Zainuri
- 91-104 **Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**
Rosmaria Syafariyah Widjajanti
- 105-118 **Sains dan Agama dalam Epistemologi Islam dan Barat**
Edwin Syarif

WAJAH ISLAM: ANTARA MILITANSI DAN TOLERANSI

ISLAM mengalami evolusi sesuai konteks sosial budaya dan politik yang mengitarinya. Itu pula yang menyebabkan Islam lahir dalam beragam wajah. Militansi dan toleransi adalah di antara wajah Islam. Keduanya bisa hadir secara bersamaan, tapi bisa berhadapan secara frontal. Hal tersebut terlihat dari ragam pemaknaan terhadap realitas sosial yang disajikan oleh para penulis di dalam jurnal **Refleksi** kali ini.

Tulisan pertama disajikan oleh Chaider S. Bamualim yang mengkaji masalah konsolidasi militan dalam Islam melalui reproduksi makna jihad. Menurutnya Islamisasi yang melanda dunia Islam dalam dasawarsa belakangan berhasil mengkonsolidasi gerakan Islam dan mereproduksi makna jihad. Lebih dari itu, hal tersebut telah berhasil mengaktifkan jihad sebagai instrumen ideologis yang kontroversial. Gejala ini secara tak terelakkan sering-kali menimbulkan kesalahpahaman, baik oleh kaum Muslim sendiri maupun kalangan non-Muslim di Barat maupun di Timur. Bagi sebagian sarjana Barat, jihad yang merupakan ajaran Islam adalah perang agama (*holy war*), karenanya, Islam dicap sebagai agama brutal, yang menerapkan pola-pola militerisme serta menyatakan perang bukan saja absah tetapi juga suci.

Proses Islamisasi juga menjelma dalam bentuk formalisasi syariat yang diterapkan dalam sebuah negara bangsa (*nation state*). Hal tersebut sebagaimana dipotret oleh Mardani dalam penerapan syariat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan syariat di bumi rencong ini tidak terlepas dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam upaya mendapatkan status otonomi khusus. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal mendasar dari Undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan mengimplementasikan tata

bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari dulu hingga sekarang memerlukan seperangkat tatanan, baik yang bersumber dari ajaran agama secara langsung atau melalui keputusan-keputusan berdasarkan keperluan kontemporer, baik tatanan itu sudah diundangkan secara tertulis atau belum ditulis, baik tatanan itu bersifat asasi (undang-undang dasar) atau pengembangan. Menurut Sirojuddin Aly dengan tatanan yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi teratur dan tertib. Sebaliknya tanpa adanya seperangkat tatanan, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat menjadi semrawut, tidak teratur dan pasti akan terjadi hukum rimba. Sirojuddin Aly mencoba mengemukakan beberapa prinsip dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara dari perspektif pemikiran politik Islam, seperti prinsip musyawarah, persamaan, kemerdekaan, penegakan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini ternyata merupakan nilai-nilai universal, di mana bangsa-bangsa yang beradab dalam bermasyarakat dan bernegara juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun dalam rangka kontekstualisasi, penafsiran dan pemaknaan terhadap prinsip-prinsip tersebut sering tak terelakkan.

Hal ini juga terjadi dalam memahami peran dan fungsi ulama. Menurut Haniah Hanafie, ulama atau kiai sering dipahami sebagai sumber panutan keagamaan. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak hanya sebagai panutan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi seluruh aspek kehidupan, sehingga semua perilaku dan tindakan ulama akan ditiru tanpa reserve. Bahkan masyarakat pengikutnya (jamaahnya) cenderung membenarkan atau melindunginya apabila sang ulama mengalami tantangan dari pihak lain. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap ulama sangat diutamakan atau dengan istilah lain *taqlid*. Peran ulama yang dikenal selama ini hanya sebagai pendakwah, penceramah, pengasuh pondok pesantren dan pemuka agama, ternyata tidaklah demikian, karena sejarah membuktikan bahwa ulama juga ikut berperan dalam politik praktis, baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru peran Ulama mengalami penyempitan. Ulama dikembalikan kepada peran awalnya sebagai sumber pengetahuan dan keteladanan keagamaan.

Muara dari wacana dan aktualisasi ajaran agama adalah terciptanya tatanan yang harmonis dan penuh kedamaian. Hal tersebut bisa dicapai

apabila di dalam diri masyarakat terserap nilai-nilai yang menjunjung toleransi. Menurut Ahmad Abrori masalah toleransi sesungguhnya terkait dengan artikulasi wacana dan realisasi praktiknya dalam kehidupan nyata. Keduanya saling terkait dan saling mendukung bagi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama. Namun disayangkan, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari tidak didukung oleh artikulasi wacana secara baik. Akibatnya, terdapat ketegangan wacana di kalangan masyarakat bila membicarakan toleransi. Hal inilah yang terlihat dalam masyarakat Pandeglang, Banten.

Refleksi kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas tentang pemberantasan korupsi. Menurut Achmad Zainuri geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi yang berlangsung saat ini tidak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (*political will*) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap.

Kajian lain terkait dengan harmoni disajikan oleh Rosmaria. Berdasarkan studi terhadap masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat. Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.

Sebagai penutup, Edwin Syarif memaparkan permasalahan hubungan antara sains dan agama. Perkembangan hubungan antara sains dan agama mengalami pergeseran pada masa modern, yaitu munculnya sains-sains sekuler yang menolak agama. Sains dan agama dalam masa kejayaan Islam tidak pernah berpisah bahkan keduanya saling mendukung. Oleh karena itu di masa sekarang ini, perlu adanya sintesis epistemologi antara Islam dan Barat, yang kelak diharapkan dapat memunculkan sains-sains yang dapat mengatasi permasalahan manusia tanpa dibarengi dengan dampak negatif dari sains itu sendiri.

Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari ragam dimensi kemanusiaan yang penuh harmoni dan toleransi di satu sisi, dan militansi di sisi yang lain. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2006

Redaksi

MERAYAKAN TOLERANSI: STUDI ATAS MASYARAKAT MUSLIM PANDEGLANG¹

Ahmad Abrori

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ahmad.abrori@uinjkt.ac.id

Abstract: *The issue of tolerance is actually related to the articulation of discourse and the realization of practices in real life. Both are interrelated and support each other for the creation of good relations among religious communities. Unfortunately, what becomes the daily reality is not supported by a good discourse articulation. As a result, there is tension in discourse among the people of Pandeglang when discussing tolerance. This study focuses on the views of the Pandeglang community regarding tolerance among religious communities. The initial interest in conducting this study is due to the fact that in Pandeglang, there is not a single non-Muslim place of worship built there. Looking at the composition of its population, there are several non-Muslim communities living amidst the predominantly Muslim community.*

Keywords: *Tolerance, Muslims, Interreligious Harmony, Pandeglang, Banten, Indonesia.*

Abstrak: *Masalah toleransi sesungguhnya terkait dengan artikulasi wacana dan realisasi praktiknya dalam kehidupan nyata. Keduanya saling terkait dan saling mendukung bagi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama. Yang disayangkan, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari tidak didukung oleh artikulasi wacana secara baik. Akibatnya, terdapat ketegangan wacana di kalangan masyarakat Pandeglang bila membicarakan toleransi. Studi ini mengenai pandangan masyarakat Pandeglang tentang toleransi antar umat beragama. Ketertarikan awal dilaksanakannya studi ini adalah karena fakta bahwa di Pandeglang tak satu pun rumah ibadah non-Muslim yang dibangun di sana. Jika melihat komposisi penduduknya, terdapat sejumlah komunitas non-Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim yang mayoritas.*

Kata Kunci: *Toleransi, Muslim, Kerukunan Umat Beragama, Pandeglang, Banten, Indonesia.*

Pendahuluan

Saat ini untuk tingkat kelurahan Pandeglang, jumlah komunitas non-Muslim terbilang kecil. Ada umat Buddhis yang berjumlah 72 orang. Ada umat Kristen yang berjumlah 39 orang. Jumlah ini tidak mencapai 1% total keseluruhan warga kelurahan Pandeglang yang mencapai 17.868 orang. Adapun umat Hindu di kelurahan Pandeglang tidak ada.² Meski komunitas non-Muslim ini terbukti ada di Pandeglang sementara rumah ibadah mereka tidak ada, sampai sejauh ini belum terdengar isu-isu kekerasan yang melibatkan Islam dan non-Islam. Karena itu sangat menarik untuk diteliti kerukunan umat beragama yang terjadi di wilayah ini. Penelitian ini menganggap bahwa jika toleransi dipahami sebagai konsep tentang kebebasan beragama, maka perlu dicari tahu bagaimana kehidupan kebebasan beragama masyarakat Pandeglang.

Sampai saat ini Pandeglang dikenal dengan penduduknya yang 'kuat' memegang nilai-nilai ajaran Islam, seperti halnya daerah lain yang ada di wilayah administratif Provinsi Banten. Tak heran jika Pandeglang dan daerah lainnya di Provinsi Banten berkeinginan kuat untuk menerapkan syariat Islam. Penelitian ini memandang bahwa konsep toleransi yang diyakini masyarakat Pandeglang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai bersama yang berasal dari ajaran Islam ini.

Selain nilai-nilai yang datangnya dari ajaran Islam, penelitian ini memandang bahwa budaya juga merupakan sumber nilai lain yang menjadi acuan bertindak masyarakat Pandeglang. Hal ini didasarkan temuan penelitian sebelumnya seperti Kartodirdjo³ dan Tihami⁴ yang

mengungkap bahwa nilai-nilai budaya melahirkan sosok-sosok jawara sebagai pemimpin yang tak kalah berpengaruhnya dengan kiai yang lahir dari nilai-nilai ajaran Islam. Kedua pemimpin ini diyakini sebagai kelompok sosial yang mampu berperan penting dalam dinamika kehidupan masyarakat setempat.

Harus diakui bahwa kedua sumber nilai ini saling bertautan dan saling mengisi yang kemudian bisa menjadi nilai-nilai bersama yang diakui oleh warga masyarakat Pandeglang, dan Banten pada umumnya. Karena itu penelitian ini memandang bahwa nilai-nilai bersama itu memiliki kaitan erat dengan konsep toleransi yang dipahami oleh masyarakat Pandeglang.

Atas kondisi yang demikian, maka peneliti merasa perlu melakukan studi tentang toleransi yang di antara informannya adalah kiai dan jawara. Selain nilai-nilai bersama yang bagaimana yang dianut oleh masyarakat Pandeglang kaitannya dengan konsep toleransi, peran kiai dan jawara dalam pembentukan konsep toleransi juga perlu dicari tahu. Berikut ruang lingkup permasalahan yang dijadikan acuan dalam penelitian kali ini.

	Aspek	Ruang Lingkup
Toleransi dalam Pandangan Masyarakat Muslim di Pandeglang	Nilai-nilai yang dianut bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan masyarakat Pandeglang tentang toleransi antara mayoritas-minoritas - Penilaian masyarakat terhadap peran yang harus dilakukan berkaitan dengan masalah toleransi - Tipe interaksi mayoritas-minoritas
	Peran Pemimpin Mensosialisasikan Toleransi	<ul style="list-style-type: none"> - Pola sosialisasi pemimpin tentang konsep toleransi - Hubungan antar pemimpin agama dan pemerintah

Metodologi Penelitian

Dengan ruang lingkup permasalahan yang demikian, maka penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: Bagaimana pandangan masyarakat Muslim mayoritas di Pandeglang tentang konsep toleransi? yang diderivasikan menjadi; (1) *Bagaimana nilai-nilai yang dianut bersama masyarakat mayoritas Muslim Pandeglang?* (Bagaimana pandangan masyarakat Pandeglang tentang hidup berdampingan dengan kelompok yang lain agama? Apa peran yang harus dilakukan berkaitan dengan masalah toleransi? Apa model atau tipe interaksi mayoritas-minoritas yang mereka bangun?) (2) *Bagaimana peran pemimpin dalam mensosialisasikan konsep toleransi?* (Bagaimana pola sosialisasi pemimpin tentang konsep

toleransi? Bagaimana interaksi yang terjadi antara pemimpin agama dengan pihak pemerintah?)

Dari bentuk pertanyaan seperti itu jelas penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung dan data sekunder melalui studi dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sementara itu lokasi penelitian difokuskan di Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Dipilihnya lokasi ini karena; (1) ia merupakan pusat kota sehingga penduduknya beragam dan sebagian penduduknya ada yang memeluk agama non-Islam, dan (2) di kelurahan ini pernah ada kasus penolakan pendirian rumah ibadah non-Muslim. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan berdasarkan kategori-kategori tertentu.

Kerangka Pemikiran

Toleransi berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap agama lain. Karena itu Departemen Agama RI membuat rumusan hipotesis bahwa “tumbuhnya pengetahuan (seseorang) tentang agama-agama lain menimbulkan sikap saling pengertian dan toleran kepada orang lain dalam hidup sehari-hari, sehingga tumbuh pula kerukunan beragama”.⁵

Usaha serius yang berkaitan dengan toleransi ini adalah harus melalui dialog antar umat beragama. Bagi Kimball, seperti yang dikutip Azra, dialog antar agama untuk menumbuhkan kesepahaman antar keduanya merupakan babak baru (*a new chapter*) dalam sejarah panjang hubungan antara Islam-Kristen. Dialog ini diharapkan bisa mengeliminir sikap dan persepsi negatif antar keduanya. Sikap dan persepsi negatif selama ini ada tak lain karena hubungan mereka selama ini amat kental dicirikan dengan ketidakpercayaan (*mistrust*), kesalahan-memahami (*misunderstanding*) dan adanya sikap antipati satu sama lain (*mutual antipathy*).

Untuk menghilangkan sikap dan persepsi negatif ini memang memerlukan pengetahuan toleransi yang dipahami secara baik. Agar mendapatkan pengetahuan yang baik itu menurut Mukti Ali seseorang perlu melengkapi dirinya dengan empat hal, yakni; *intelektual*, *emosional*, *kemauan* dan *pengalaman*.⁶ Intelektual berarti seseorang perlu mempunyai alat untuk memahami agama lain, seperti bahasa, buku bacaan, akses pada

media (koran, radio, televisi, internet), diskusi, dan pendidikan tertentu (formal dan non formal [*training, workshop*]). Emosional berarti bahwa perlu ada *'feeling'* atau perhatian terhadap pemeluk agama lain. Bentuk perhatian itu macam-macam, baik pasif maupun aktif seperti mendoakan, menyumbang, menyalurkan sumbangan, menjadi relawan. Kemauan berarti membuka diri untuk mengakui adanya realitas agama yang berbeda-beda yang ditandai dengan mau berdialog, bergaul, berinteraksi, bekerja-sama dengan penganut agama lain. Sementara pengalaman berarti pernah melakukan dialog, bergaul, berinteraksi, bekerja-sama dengan penganut agama lain baik formal maupun informal.

Ke semua usaha ini sesungguhnya amat terkait dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah aturan moral yang menjadi acuan dalam berpikir dan bertindak yang bersumber pada sesuatu yang sangat tinggi. Karena itu, Wasburn⁷ meyakini bahwa budaya (yang di dalamnya termasuk ajaran agama dan tradisi) amat mempengaruhi perilaku seseorang. Ia mengistilahkan sesuatu yang mempengaruhi perilaku seseorang itu dengan *shared belief and value system* atau sistem nilai dan kepercayaan bersama.

Dalam konteks penelitian kali ini, konstruksi *shared belief and value system* diasumsikan banyak bersumber dari dalil-dalil agama dan keyakinan bersama masyarakat yang mengakar pada tradisi. Sementara itu masyarakat Pandeglang tampaknya merupakan prototipe komunitas Indonesia pada umumnya, yakni komunitas yang kuat memegang ajaran-ajaran tradisi dan agama.

Cara untuk memahami *shared belief and value system* sebuah kelompok adalah dengan menanyakan tentang apa peran yang harus dimainkan dalam komunitas lokal mereka,⁸ maka dalam konteks toleransi pertanyaan tentang peran pun bisa ditanyakan. Menurut Abdillah sikap toleransi dalam masyarakat terbagi dua, yakni negatif (pasif) dan positif (aktif). Yang negatif yakni jika toleransi itu sebatas pada tidak mengganggu dan membiarkan orang lain mempraktikkan agamanya. Sementara yang positif adalah tidak sebatas itu, tapi juga berpartisipasi untuk memberikan bantuan.

Karena ini menyangkut hubungan antara dua kelompok, maka perlu diinterpretasikan tipe interaksi mayoritas-minoritas yang ada berdasarkan data-data yang terkumpul. Mengutip penjelasan Zaman,⁹ bahwa interaksi yang terjadi antara mayoritas-minoritas adalah karena ada relasi kuasa

timpang yang ditandai dengan penindasan, diskriminasi dan segregasi. Karena itu ia mengajukan beberapa tipe interaksi mayoritas-minoritas yakni, asimetris, resiprokal, dan simetris.

Asimetris berarti mayoritas sangat mempengaruhi *survival* kelompok minoritas. Biasanya ditandai dengan kekerasan fisik dan non-fisik antara kelompok mayoritas terhadap minoritas. Resiprokal berarti saling memberi masukan satu sama lain antara mayoritas dan minoritas. Dalam tipe ini yang muncul biasanya interaksi yang relatif tidak bermasalah karena masing-masing mengakui eksistensi satu sama lain, meskipun gesekan kecil-kecilan bisa saja terjadi. Sementara simetris berarti satu sama lain hidup sendiri-sendiri, tidak ada saling mempengaruhi dan interaksi yang terjadi tidak memberi keuntungan atau kerugian antara yang satu terhadap yang lain.

Penelitian ini menduga tipe interaksi ini kemungkinan dipengaruhi pola sosialisasi konsep toleransi oleh pemimpin. Yang dimaksud dengan sosialisasi di sini adalah bagaimana pemimpin agama dan tradisi pada masyarakat Pandeglang berperan dalam mentransformasikan ide-idenya tentang toleransi kepada masyarakat luas. Perlu dicari tahu apakah pola sosialisasinya itu, mengikuti klasifikasi Jaeger,¹⁰ berbentuk sosialisasi represif ataukah sosialisasi partisipatoris. Singkatnya, sosialisasi represif adalah sosialisasi yang menekankan bentuk komunikasi satu arah. Sementara sosialisasi partisipatoris menekankan komunikasi dua arah, terjadi interaksi, adanya atmosfer kebebasan dan kekerasan sebisa mungkin dihindari.

Aspek terakhir yang ingin dilihat adalah relasi antara pemimpin agama dengan pihak pemerintah. Penelitian ini menduga bahwa relasi antara pemimpin agama dengan pihak pemerintah kaitannya dengan toleransi umat beragama adalah bahwa agama menjadi jembatan pertemuan antara kepentingan yang berbeda dari pihak kelompok agama dan pemerintah. Sejauh keduanya menganggap ada hubungan simbiotik antara agama dan stabilitas sosial di masyarakat, maka hubungan antara pemimpin agama dan pemerintah bisa sama-sama menguntungkan.

Temuan Penelitian

Tampaknya pengetahuan masyarakat Muslim Pandeglang tentang toleransi banyak berasal dari nilai-nilai yang dianut bersama, terutama yang berasal dari ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut sudah mentradisi dan

diyakini secara turun temurun. Kelompok sosial yang paling berperan memelihara nilai-nilai itu adalah ulama, baik para kiai maupun jawara yang menjadi ustaz.

Terbentuknya pengetahuan masyarakat Pandeglang tentang toleransi itu tidak dibangun melalui model intelektual dengan cara dialog antar umat beragama di Pandeglang. Dialog antar umat beragama di Pandeglang adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan. Dialog yang ada lebih bersifat informal dan tak terarah. Karena itu ia tidak mendukung bagi tumbuhnya saling pengertian dan toleran antar warga yang berbeda agama di Pandeglang.

Salah satu sebab sosialnya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan warga setempat. Untuk menciptakan dialog keagamaan yang serius, terarah dan kondusif bagaimanapun juga memerlukan kerja-kerja akademik, seperti akses yang mudah terhadap buku, jurnal, majalah dan berbagai media cetak dan elektronik, terdapatnya forum resmi dialog antar agama, kegiatan-kegiatan diskusi, seminar dan *workshop* tentang toleransi, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama. Adanya perguruan tinggi juga cukup membantu membangun wacana tentang toleransi dengan terbiasa menyelenggarakan seminar atau diskusi tentang toleransi. Sementara itu mereka yang lulus sarjana sejauh ini baru mencapai 0,68% dari 12.821 jumlah total lulusan di seluruh level pendidikan. Sementara mayoritas warga kelurahan Pandeglang sebanyak 88,7%-nya adalah lulusan SLTA ke bawah.

Terbentuknya pengetahuan masyarakat Pandeglang tentang toleransi itu umumnya dibangun melalui pergaulan interaksi sehari-hari. Ini artinya bahwa aspek emosional, kemauan dan pengalaman dalam berinteraksi memberi kontribusi positif mendukung bagi tumbuhnya saling pengertian dan toleran antar warga yang berbeda agama di Pandeglang. Orang-orang Muslim di wilayah Kelurahan Pandeglang memandang orang-orang non-Muslim itu berperilaku baik serta mau berbaur, berinteraksi, memberi bantuan dan pertolongan kepada warga Muslim. Karakter warga Muslim Pandeglang yang mudah bergaul merupakan kunci relasi antar warga yang berbeda agama. Ini tentu saja membuat komunitas non-Muslim merasa diakui eksistensinya.

Kemauan warga mayoritas untuk membuka diri berinteraksi dengan warga non-Muslim sesungguhnya berasal dari keyakinan mereka bahwa komunitas non-Muslim itu warga asli Pandeglang. Yang disebut

pendatang adalah generasi orang tuanya dahulu. Di samping keyakinan yang demikian, warga juga meyakini bahwa hubungan antar umat beragama itu harus dilihat dari sisi humanismenya. Artinya, sebagai manusia biasa mereka yang non-Muslim perlu diberi kebebasan untuk mempraktikkan agamanya sesuai dengan keyakinan yang ia anut.

Selain itu, pemahaman toleransi sebagian masyarakat Muslim Pandeglang lebih banyak didapat dari penjelasan kiai atau ustaz. Ini menjadi sesuatu yang lumrah karena Islam sangat kuat di sana. Karena itu pemimpin agama Islam memainkan peran penting bagi terbentuknya konsep toleransi yang dipahami warga. Mungkin model intelektual seperti inilah yang umum ditemukan di Pandeglang. Cara intelektual yang demikian sesungguhnya menggambarkan model paternalistik. Artinya, kiai dan ustaz adalah panutan bagi warga masyarakat Pandeglang. Temuan ini memperkuat tesis penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dkk.¹¹ J.A.C. Mackie,¹² dan Kristiadi¹³ yang menggambarkan bahwa pemimpin menjadi cermin bagi masyarakat. Terlebih lagi pemimpin itu dari kalangan agama, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh pemimpin agama, menjadi sesuatu yang harus diikuti.

Kurangnya pengalaman berdialog secara intelektual antar pemimpin agama atau antar warga berbeda agama berakibat pada munculnya ketegangan wacana mengenai konsep toleransi. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan di atas bahwa dialog informal dan tak terarah, yang sesungguhnya hanya dilakukan sebagian kecil warga, tidak mendukung bagi tumbuhnya saling pengertian dan toleran antar warga yang berbeda agama di Pandeglang. Ini terbukti dengan masih sensitifnya term toleransi untuk diperbincangkan. Meski antara warga Muslim yang mayoritas dan warga non-Muslim yang minoritas sudah berbaur, namun bila membicarakan masalah toleransi mereka sangat berhati-hati. Warga Muslim lebih nyaman menggunakan istilah toleransi kewargaan daripada toleransi agama. Di antara sebagian warga, ada yang menganggap toleransi kewargaan itu bahkan bisa melahirkan persaudaraan antar mereka sesama warga. Namun umat Muslim secara tegas menganggap toleransi itu tidak berlaku untuk penyediaan bangunan rumah ibadah non-Muslim.

Meski fenomena ketegangan wacana tentang toleransi itu tetap berlangsung akan tetapi pada praktik kehidupan sehari-hari hampir tidak bisa dirasakan. Ini terkait dengan peran masing-masing yang mereka lakukan guna menjaga hubungan baik sesama warga. Jika menggunakan

klasifikasi Abdillah,¹⁴ maka sesungguhnya sikap toleransi warga Muslim Pandeglang dimasukkan ke dalam kelompok yang positif. Artinya, warga Muslim tidak hanya sebatas pada tidak mengganggu dan membiarkan orang lain mempraktikkan agamanya tetapi lebih jauh dari itu yakni aktif memberikan bantuan, pertolongan dan pembinaan.

Peran yang dilakukan warga kelihatannya remeh tapi justru itulah yang membentuk rasa persaudaraan antar warga Muslim dan non-Muslim. Peran-peran itu di antaranya menjadi teman bermain catur di saat luang, memberikan doa saat non-Muslim memintanya untuk kelancaran usaha, membantu mengurus surat izin di kelurahan, bermain voli bersama, menerima sumbangan beras untuk warga menjelang Idul Fitri dan lain sebagainya.

Sementara peran yang dilakukan oleh non-Muslim adalah menjaga perilaku mereka agar tetap baik dan diterima oleh semua warga Muslim yang ada di lingkungannya. Umat non-Muslim yang mayoritasnya adalah keturunan Tionghoa ini umumnya keturunan Tionghoa Jawa. Sebagai keturunan Tionghoa Jawa, mereka tidak hanya pandai berdagang, tapi juga pandai berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan warga pribumi. Mungkin ini merupakan karakter mereka karena di mana saja mereka tinggal di situ pula mereka mampu menguasai bahasa lokal, yakni bahasa Sunda. Tentu saja penguasaan bahasa juga penting untuk berkomunikasi dan bergaul dengan warga setempat. Di samping membuat mereka merasa sejajar dengan pribumi, tampaknya bahasa juga berperan penting dalam rangka upaya mereka untuk bisa berbaur dan melebur dengan warga asli Pandeglang.

Tipe interaksi sosial antara Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan sehari-hari karenanya bisa dikategorikan sebagai tipe interaksi *resiprokal*. Tipe ini mensyaratkan agar masing-masing pihak memberi masukan, bantuan dan pertolongan satu sama lain, berpotensi untuk berdialog secara intelektual, memiliki perhatian satu sama lain untuk saling berbaur dan berinteraksi, memiliki kemauan untuk membuka diri dan berpengalaman untuk saling bekerja-sama dan membantu satu sama lain. Tetapi bila melihat sistem sosial yang mempengaruhi kebijakan umum masyarakat Pandeglang, tampaknya tipe interaksi antar warga yang berbeda agama itu memiliki ciri *asimetris*. Ciri ini mensyaratkan adanya kondisi di mana warga yang mayoritas sangat mempengaruhi *survival* kelompok minoritas, Ini terlihat dengan adanya fakta bahwa non Muslim di Pandeglang banyak

menyerap tradisi lokal (yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam). Selain itu warga non-Muslim, terutama yang keturunan Tionghoa, menyadari bahwa mereka adalah kelompok sosial yang cenderung mengikuti arus mayoritas.

Demikianlah bahwa praktik kehidupan sehari-hari berkaitan dengan hubungan antar umat beragama di lingkungan masyarakat Pandeglang mampu mengeleminir upaya-upaya agar fenomena ketegangan wacana berubah menjadi ketegangan sosial. Hampir bisa dikatakan tidak ada kekerasan fisik dan konflik antar Muslim dan non-Muslim di Pandeglang. Ini karena sebagian warga non-Muslim memperlihatkan interaksi dan kemauan berbaur secara total. Tak heran kalau di antara non-Muslim tidak sedikit yang mengikuti acara maulid atau bahkan melaksanakannya sendiri di rumahnya dengan mengundang ustaz, tukang masak dan warga yang berasal dari sekitar rumahnya.

Tidak adanya konflik sosial sesungguhnya juga dipengaruhi oleh alam Pandeglang yang sejuk. Letak lokasi penelitian, misalnya, berada di kaki gunung karang yang sudah tidak aktif lagi. Dengan berada di ketinggian tanah 784 m dari permukaan laut, wilayah kelurahan ini memiliki suhu rata-rata mencapai 22,5 C⁰ - 22,9 C⁰. Akibat posisi wilayah yang demikian, penduduk sekitar kerap mendapat siraman air hujan yang mencapai 3.814 mm per tahunnya. Inilah yang membedakan Pandeglang yang berada di sebelah Selatan Banten dengan daerah lain di sebelah Utara Banten (Serang, Cilegon, Tangerang). Daerah yang ada di sebelah Utara Banten dikenal dengan kondisi alamnya yang panas karena perbukitan yang ada banyak yang sengaja diratakan dengan tanah untuk kepentingan industrialisasi. Perbedaan lainnya antar dua wilayah Banten ini adalah wilayah Selatan tidak pernah memiliki pengalaman konflik dalam sejarah sosialnya, sementara wilayah Utara sarat pengalaman dalam hal konflik sosial dalam sejarah sosialnya.

Konsep toleransi yang diistilahkan masyarakat Muslim Pandeglang dengan toleransi kewargaan mendapat dukungan kuat dari peran pemimpin agama dan lurah setempat. Sejauh ini peneliti menilai tipe sosialisasi konsep toleransi di tingkat kelompok pimpinan masyarakat Pandeglang bisa dikelompokkan pada tipe sosialisasi *participatoris* dengan beragam polanya. Bagi kiai, sosialisasi toleransi dilakukan melalui ceramah yang melibatkan pendengar yang masif atau dilakukan melalui hubungan antarpribadi dengan cara *face to face* saat ia dimintai nasehat. Di samping

pesantren miliknya, media lain yang menjadi alat sosialisasinya adalah organisasi sosial dan politik di mana ia aktif di dalamnya. Sementara jawara melakukan sosialisasi toleransi melalui majelis taklim dan melalui sepak terjangnya di bidang keamanan. Sementara Lurah mensosialisasikan toleransi melalui media yang bentuk-bentuk yang sifatnya resmi, seperti pertemuan dengan warga dan kebijakan resmi lewat kelurahan.

Sementara relasi pemimpin agama (Islam) dengan pemerintah tampaknya menjadikan agama sebagai jembatan pertemuan antara kepentingan yang berbeda dari kedua belah pihak. Sejauh keduanya menganggap ada hubungan simbiotik antara agama dan stabilitas sosial di masyarakat, maka hubungan antara pemimpin agama dan pemerintah bisa sama-sama menguntungkan.

Sebagai penutup untuk diskusi hasil penelitian ini baik kiranya sedikit menyinggung kasus penolakan rumah ibadah non-Muslim di Pandeglang. Data yang masuk ke peneliti menggambarkan bahwa tidak adanya rumah ibadah ditanggapi berbeda oleh berbagai kelompok agama. Bagi umat Buddhis, rumah ibadah Vihara bukanlah sesuatu yang mendesak untuk didirikan. Mereka menganggap bahwa jumlah mereka yang ada di wilayah Pandeglang relatif kecil. Karena itu mereka belum saatnya untuk mengajukan proposal pendirian Vihara. Dalam pandangan umat Kristiani pendirian gereja di wilayah Pandeglang adalah hal yang sulit karena kuatnya nilai-nilai Islam yang dipegang oleh masyarakat Pandeglang. Sudah 5 kali mereka mengajukan keinginannya untuk mendirikan gereja. Terhitung tahun 1975, 1985, 1989, 1990 dan terakhir tahun 1999, keinginan itu tidak pernah terlaksana. Hal ini tidak membuat mereka putus asa dan memprediksi kira-kira 10 tahun kemudian atau lebih gereja akan bisa dibangun, meski mereka tidak yakin akan prediksi tersebut. Ini meninggalkan kesan bahwa, bila dibandingkan antara umat Kristen dan umat Buddhis, nyata sekali umat Kristen lebih agresif daripada umat Buddhis.

Adapun dalam pandangan umat Islam Pandeglang, pendirian gereja di wilayah mereka tidak sesuai dengan kuantitas umat Kristen yang amat sedikit. Selain itu, penolakan adanya rumah ibadah non-Muslim di Pandeglang karena ada kekhawatiran meningkatnya jumlah umat non-Muslim di sana. Dan, tidak adanya bangunan mal, gedung bioskop dan kolam renang juga menjadi pembanding bagi tidak perlunya dibuat bangunan rumah ibadah non-Muslim.

Catatan Kaki

1. Tulisan ini didasarkan pada laporan penelitian dengan judul yang sama yang dilakukan oleh Hermawati, Ahmad Abrori dan Emi Ilmiah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Di tingkat kabupaten, pada tahun 2002, jumlah non muslim mencapai 5,8% dengan komposisi sebagai berikut: Islam 1.040.262, Kristen 385, Hindu 30 dan Budha 193. Komposisi ini tidak berubah sepanjang tiga tahun terakhir.
3. Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah studi Kasus mengenai Gerakan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984).
4. Tihami, "Kiai dan Jawara Banten, Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pesangrahan Serang, Banten", *Tesis*, Antropologi, UI, Jakarta, 1992.
5. *Buku Teks Perbandingan Agama II*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982, 145.
6. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1989), 48-49.
7. Philo C. Wasburn, *Political Sociology: Approaches, Concepts, Hypotheses* (New Jersey: Prentice-Hall, 1982), 187.
8. *Ibid.*
9. Hasan Zaman, *The Concept of Minority* (London: TP, 1981), 11.
10. Gertrude Jaeger bekerja-sama dengan LB dan PS Socialization dalam Leonard Broom dan Philip Selznick, *Sociology: A Text with Adapted Readings* (New York: Harper & Row, 1976).
11. Syahrul Hidayat dkk. "Rasionalisasi Politik Pemilih Miskin: dari Survey di Jakarta dan Surabaya" dalam *Memastikan Arab Baru Demokrasi* (Bandung: Mizan bekerja-sama dengan Laboratorium Politik FISIP UI, 2000).
12. J.A.C. Mackie, "Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru", dalam *Prisma* 2 Februari 1984.
13. J. Kristiadi, J., "Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia", dalam *Prisma*, 3 Maret 1996.
14. Masykuri Abdillah, "Religious Tolerance in a Democratic and Multicultural Society", dalam *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Jakarta in cooperation with Konrad Adenauer Stiftung, 2002), 257.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. "Religious Tolerance in a Democratic and Multicultural Society", dalam *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*, Jakarta: PBB UIN Jakarta in cooperation with Konrad Adenauer Stiftung, 2002.
- Ali, Mukti. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1989.
- Broom, Leonard & Selznick, Philip. *Sociology: A Text with Adapted Readings*, New York: Harper & Row, 1976.
- Buku Teks Perbandingan Agama II*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982.
- Hidayat, Syahrul dkk. "Rasionalisasi Politik Pemilih Miskin: dari Survey di Jakarta dan Surabaya" dalam *Memastikan Arah Baru Demokrasi*, Bandung: Mizan bekerja-sama dengan Laboratorium Politik FISIP UI, 2000.
- Kartodirjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah studi Kasus mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Kristiadi, J., "Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia", dalam *Prisma*, 3 Maret 1996.
- Mackie, J.A.C. "Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru", dalam *Prisma* 2 Februari 1984.
- Tihami, "Kiai dan Jawara Banten, Studi tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pesanggrahan Serang, Banten", *Tesis*, Antropologi, UI, Jakarta, 1992.
- Wasburn, Philo C. *Political Sociology: Approaches, Concepts, Hypotheses*, New Jersey: Prentice-Hall, 1982.
- Zaman, Hasan. *The Concept of Minority*, London: TP, 1981.

